



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6.Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama** : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat** : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima** : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	URUT	MAD	NAMA MADRASAH	KAB. KOTA	PERUBAHAN DAFTAR
				Sedanglo Bimo		Filial Bendanglong, Kel. Bendanglong Temon Bimo Kab. Boyolali
		128	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanduk Ampel	Kab. Boyolali	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kota Boyolali, Desa Tanduk Kec. Ampel Kab. Boyolali
IX.	D.I. YOGYAKARTA	129	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngloro	Kab. Gunung Kidul	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonosari Filial Ngloro, Kec. Paligan Kab. Gunung Kidul
X.	JAWA TIMUR	130	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cengklok Ngrongot	Kab. Nganjuk	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Cengklok Ngrongot, Kel. Cengklok Jl. Imam Bonjol, Kel. Cengklok, Kec. Ngrongot Kab. Nganjuk
		131	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mandaranrejo	Kod. Pasuruan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Mandaranrejo Jl. Letjen Suloyo No. 1, Kel. Mandarejo Kec. Bugul Kidul Kod. Pasuruan.
		132	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bungur	Kab. Pacitan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Bungur Desa Bungur Kec. Tulakan Kab. Pacitan.
		133	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidoarjo	Kab. Pacitan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Sidoarjo Desa Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Pacitan.
		134	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lempeni	Kab. Lumajang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Lempeni Desa Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
		135	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keringan	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Keringan, Desa Keringan, Kec. Takeran, Kab. Magetan.
		136	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krowe	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Krowe Desa Krowe, Kec. Lembangan, Kab. Magetan.
		✓ 137	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mlarik Baderan	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Mlarik Baderan Kec. Geneng, Kab. Ngawi
		✓ 138	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 145 (SERATUS EMPAT PULUH LIMA)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Timur	MIN Tulakan	MIN 1 Pacitan
2	Jawa Timur	MIN Bungur	MIN 2 Pacitan
3	Jawa Timur	MIN Sidoarjo	MIN 3 Pacitan
4	Jawa Timur	MIN Kalak	MIN 4 Pacitan
5	Jawa Timur	MIN Wonokarto	MIN 5 Pacitan
6	Jawa Timur	MIN Bogem Sampung	MIN 1 Ponorogo
7	Jawa Timur	MIN Lengkong Sukorejo	MIN 2 Ponorogo
8	Jawa Timur	MIN Janti	MIN 3 Ponorogo
9	Jawa Timur	MIN Bangunrejo	MIN 4 Ponorogo
10	Jawa Timur	MIN Mlarak	MIN 5 Ponorogo
11	Jawa Timur	MIN Paju	MIN 6 Ponorogo
12	Jawa Timur	MIN Winong	MIN 7 Ponorogo
13	Jawa Timur	MIN Prigi	MIN 1 Trenggalek
14	Jawa Timur	MIN Kayen Karang	MIN 2 Trenggalek
15	Jawa Timur	MIN Tunggangri	MIN 1 Tulungagung
16	Jawa Timur	MIN Jeli Karangrejo	MIN 2 Tulungagung
17	Jawa Timur	MIN Pandansari (MIN Dukuh Jati Ngunut)	MIN 3 Tulungagung
18	Jawa Timur	MIN Pucung Ngantru	MIN 4 Tulungagung
19	Jawa Timur	MIN Rejotangan	MIN 5 Tulungagung
20	Jawa Timur	MIN Ngepoh	MIN 6 Tulungagung
21	Jawa Timur	MIN Mergayu	MIN 7 Tulungagung
22	Jawa Timur	MIN Bulurejo	MIN 1 Lumajang
23	Jawa Timur	MIN Lempeni	MIN 2 Lumajang
24	Jawa Timur	MIN Locare	MIN 1 Bondowoso
25	Jawa Timur	MIN Kerang	MIN 2 Bondowoso

61	Jawa Timur	MIN Kepukrejo	MIN 7 Magetan
62	Jawa Timur	MIN Krowe	MIN 8 Magetan
63	Jawa Timur	MIN Semen	MIN 9 Magetan
64	Jawa Timur	MIN Sidorejo	MIN 10 Magetan
65	Jawa Timur	MIN Kedungguwo	MIN 11 Magetan
66	Jawa Timur	MIN Taman Arum	MIN 12 Magetan
67	Jawa Timur	MIN Baleasri	MIN 13 Magetan
68	Jawa Timur	MIN Janggan	MIN 14 Magetan
69	Jawa Timur	MIN Turi	MIN 15 Magetan
70	Jawa Timur	MIN Baluk	MIN 16 Magetan
71	Jawa Timur	MIN Bandem	MIN 1 Ngawi
72	Jawa Timur	MIN Mlarik Baderan	MIN 2 Ngawi
73	Jawa Timur	MIN Ngamban Kendal	MIN 3 Ngawi
74	Jawa Timur	MIN Randosongo Kec. Geneng	MIN 4 Ngawi
75	Jawa Timur	MIN Gelung Kec. Paron	MIN 5 Ngawi
76	Jawa Timur	MIN Ngrongi	MIN 6 Ngawi
77	Jawa Timur	MIN Pakah	MIN 7 Ngawi
78	Jawa Timur	MIN Bendo	MIN 8 Ngawi
79	Jawa Timur	MIN Ngrayudan	MIN 9 Ngawi
80	Jawa Timur	MIN Tirak	MIN 10 Ngawi
81	Jawa Timur	MIN Sambirejo	MIN 11 Ngawi
82	Jawa Timur	MIN Ketanggung	MIN 12 Ngawi
83	Jawa Timur	MIN Babadan	MIN 13 Ngawi
84	Jawa Timur	MIN Begal	MIN 14 Ngawi
85	Jawa Timur	MIN Kepatihan	MIN 1 Bojonegoro
86	Jawa Timur	MIN Balenrejo	MIN 2 Bojonegoro
87	Jawa Timur	MIN Pandan	MIN 3 Bojonegoro
88	Jawa Timur	MIN Tuban	MIN 1 Tuban
89	Jawa Timur	MIN Punggulrejo Rengel	MIN 2 Tuban
90	Jawa Timur	MIN Blawirejo	MIN 1 Lamongan
91	Jawa Timur	MIN Kawistolegi	MIN 2 Lamongan
92	Jawa Timur	MIN Sumber Banjar	MIN 3 Lamongan
93	Jawa Timur	MIN Kedamean (MIN Gresik)	MIN 1 Gresik
94	Jawa Timur	MIN Kedung Sekar Bejeng	MIN 2 Gresik
95	Jawa Timur	MIN Zamal	MIN 1 Bangkalan
96	Jawa Timur	MIN Sukolilo	MIN 2 Bangkalan

132	Jawa Timur	MIN Gerahan	MIN 4 Jember
133	Jawa Timur	MIN Sempolan	MIN 5 Jember
134	Jawa Timur	MIN Tanggul Wetan	MIN 6 Jember
135	Jawa Timur	MIN Kanigoro	MIN 1 Kediri
136	Jawa Timur	MIN Doko Gampangrejo	MIN 2 Kediri
137	Jawa Timur	MIN Plosolor	MIN 3 Kediri
138	Jawa Timur	MIN Klagen Serut	MIN 1 Madiun
139	Jawa Timur	MIN Bancong Wonoasri	MIN 2 Madiun
140	Jawa Timur	MIN Rejosari	MIN 3 Madiun
141	Jawa Timur	MIN Doho Dolopo	MIN 4 Madiun
142	Jawa Timur	MIN Donomulyo (MIN Kab. Malang)	MIN 1 Malang
143	Jawa Timur	MIN Druju Sumber Manjing Wetan	MIN 2 Malang
144	Jawa Timur	MIN Kalipare	MIN 3 Malang
145	Jawa Timur	MIN Gedog (MIN Gedon Garun)	MIN Kota Blitar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN





Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur
Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

60717893

Merupakan Kenada :

MIN SAMBIREJO

SAMBIREJO

Sambirejo Kel. Ngambe Kabupaten Ngawi Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : 10/ tahun 1997

Tanggal SK Ijin Operasional : 17-03-1997

17 Desember 2016

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur

Kantor Wilayah

DR. MAHFUDR KHODAR, M.Ag

NIP: 19620120199031001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NGAWI**

Jalan Kartini No : 15 Telp. 0351-749504 Fax. 0351-749183

NGAWI

Nomor Statistik Madrasah :

1 1 1 1 3 5 2 1 0 0 4

Nama Madrasah :

MIN SAMBIREJO

Alamat Madrasah :

Sambirejo Ngrambe Ngawi

Kepala

Drs. H. A. Roziq, M.Si

NIP. 195406011978031001